



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ALI MUHSON
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 765802

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.220.850.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA JEPARA, WARISAN Rp. 196.350.000
3. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA JEPARA, WARISAN Rp. 24.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 175.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERRIOS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SOLO 150CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 79.868.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 337.479.730**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.813.197.730



III. HUTANG

Rp. 18.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.795.197.730

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.